PERLINDUNGAN HUKUM BAGI UPAH PEKERJA AKIBAT PANDEMI
COVID-19 DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Islamiyan¹

Islamiyani12345@gmail.com

Rina Antasari²

Fatroyah Ars Himsya³

¹²³Fakultas Syariah dan Hukum UIN Raden Fatah Palembang

ABSTRACT

Reason (*hifdzu al-'aql*), offspring (*hifdzu nāsl*), and property (*hifdzu-māl*). The Perspective *Maqashid Syariah* for Legal Protection of Workers Due to the Covid-19 Pandemic has fulfilled the benefit of property (*hifdzu-māl*) and contains *hifdzu-nāfs* (protection of life). The research method used in this research is *Library Research* with library materials sources, data collection techniques through several books, legal magazines, legislation and other documents related to the discussion. Then the data were analyzed using *descriptive* analysis. Based on the results of the study, it can be concluded that: *First*, in the *Circular Letter of the Ministry of Manpower Number M/3/HK.04/III/2020*, workers/labourers affected by the Pandemic *Covid-19* such as ODP (People Under Supervision), PDP (Internal Patients) treatment), or patients who are positive for corona are entitled to wages. *Second*, the theory in *Maqashid Syariah* there are five basic basic needs, namely: religion (*hifdzu-din*), soul (*hifdzu-nāfs*),

Keywords : *Wage Protection; Covid-19; Maqashid Syariah*

ABSTRAK

Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Pandemi Covid-19 telah memenuhi kemaslahatan harta (*hifdzu-māl*) dan mengandung *hifdzu-nāfs* (perlindungan terhadap jiwa). Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah *Library Research* dengan sumber bahan kepustakaan, teknik pengumpulan data melalui beberapa buku, majalah hukum, Peraturan Perundang-undangan dan dokumen-dokumen lain yang berkaitan dengan pembahasan. Kemudian data tersebut dianalisis menggunakan *deskriptif* analisis. Berdasarkan dari hasil penelitian dapat disimpulkan diantaranya: *Pertama*, dalam *Surat Edaran Kementerian Ketenagakerjaan Nomor M/3/HK.04/III/2020*, pekerja/buruh yang terdampak Pandemi *Covid-19* seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan), atau pasien yang positif corona berhak mendapatkan upah. *Kedua*, Teori dalam *Maqashid Syariah* terdapat lima pokok kebutuhan dasar, yaitu : agama (*hifdzu-din*), jiwa (*hifdzu-nāfs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu nāsl*), dan harta (*hifdzu-māl*). Perspektif *Maqashid Syariah*

Kata kunci : *Perlindungan Upah, Covid-19, Maqashid Syariah*

Pendahuluan

Setiap warga negara pasti memiliki keinginan untuk berkehidupan dan bekerja secara layak agar mendapatkan hidup yang sejahtera. Salah satu hak pekerja/buruh adalah untuk mendapatkan upah dari pengusaha atau pemberi kerja. Pemberian upah yang adil dan setimpal akan memicu kinerja yang dilakukan oleh buruh atau pekerja, mereka akan bersemangat ketika upah seimbang dengan apa yang mereka kerjakan. Upah yang seimbang akan memotivasi pekerja untuk lebih maksimal bekerja di perusahaan tersebut. Berkaitan dengan permasalahan upah, sangat jelas bahwa para buruh berhak mendapatkan hak atas kewajiban yang mereka lakukan.

Upah merupakan hak Normatif buruh, karena peraturan perundang-undangan yang mengatur masalah upah memuat sanksi pidana bagi pengusaha yang melanggar peraturan perundang-undangan terkait dengan masalah pengupahan. jika hal tersebut terjadi maka tindakan yang dilakukan pengusaha termasuk dalam tindak pidana kejahatan. Menurut Bab I Pasal 1 angka 30 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan :

“Upah tenaga kerja adalah hak Pekerja atau Buruh yang diterima dan dinyatakan dalam bentuk uang sebagai imbalan dari pengusaha atau pemberi kerja kepada pekerja atau buruh yang ditetapkan dan dibayarkan menurut suatu perjanjian kerja, kesepakatan atau peraturan perundang-undangan termasuk tunjangan bagi pekerja atau buruh dan keluarganya atas suatu pekerjaan atau jasa yang telah atau akan dilakukan”¹.

Upah tidak akan dibayar apabila pekerja/buruh tidak melakukan pekerjaan kecuali pekerja/buruh sakit, haid, menikah, mengkhitankan, menjalankan tugas negara, menjalankan ibadah yang diperintahkan agamanya, pekerja/buruh melaksanakan tugas atas persetujuan pengusaha, dan pekerja/buruh melaksanakan tugas pendidikan dari perusahaan. Jika perusahaan tidak membayar upah karena adanya alasan tersebut, maka perusahaan akan bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau apabila perusahaan dengan serta merta melakukan pemutusan kerja (PHK) dengan alasan tersebut Perusahaan yang melakukan PHK, maka PHK tersebut batal demi hukum dan perusahaan/ pengusaha wajib mempekerjakan kembali pekerja/buruh yang bersangkutan

¹ Pasal 1 angka 30 Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

(Pasal 153 ayat 2 UU Ketenagakerjaan)².

Untuk melindungi pekerja Pemerintah juga menetapkan upah minimum sebagaimana ayat (3) huruf a pasal 88 ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan mengatur tentang “ *setiap pekerja/buruh berhak memperoleh penghasilan yang memenuhi penghidupan yang layak bagi kemanusiaan*”. menurut pasal ini, upah merupakan hak pekerja setelah bekerja kepada perusahaan. Agar upah diberikan secara adil kepada seluruh pekerja, ditetapkan kebijakan mengenai upah minimum yang memperhitungkan produktivitas dan absensi pekerja. Pengaturan pengupahan yang ditetapkan atas kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh atau serikat buruh tidak boleh atau serikat buruh tidak boleh rendah dari ketentuan pengupahan yang ditetapkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Baru-baru ini dunia diguncangkan dengan hadirnya Virus Corona, menurut WHO infeksi virus ini disebut Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan pertama kali ditemukan di kota Wuhan, Cina, pada akhir Desember 2019. virus ini menular dengan cepat dan telah menyebar ke wilayah lain di cina dan ke beberapa negara, termasuk Indonesia. Organisasi Kesehatan dunia (WHO) telah menyatakan Virus Corona sebagai pandemi atau suatu wabah yang telah menjadi masalah global.

Mengenai Pandemi Virus Corona atau Covid-19 tentu terdapat banyak sekali dampak baik secara langsung maupun tidak langsung. Salah satunya banyak warga yang mengalami dampak sosial ekonomi, dampak tersebut tentunya sangat terasa bagi para pekerja. Pekerja yang dirumahkan tanpa upah dan terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) terus bertambah dari hari ke hari.

Sehubungan semakin luasnya penyebaran wabah *Corona Virus Disease 2019* (Covid-19), Direktur Jendral Pembinaan Pelatihan dan Produktivitas Kementerian Ketenagakerjaan B Satrio Lelono mencatat jumlah buruh yang terkena pemutusan hubungan kerja (PHK) dan dirumahkan mencapai 2,8 juta. Lonjakan PHK dan pekerja dirumahkan sebagai dampak ekonomi di tengah pandemi virus Corona. Jumlah itu, ia melanjutkan, berasal dari pekerja Formal dan Nonformal. “saat ini, 2,8 juta. Bisa lebih dan akan terus bertambah.” meskipun Presiden Jokowi Widodo melarang pengusaha tidak

² Pasal 153 ayat (2) Undang-Undang Ketenagakerjaan

melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), namun ini tetap dikhawatirkan karena masih akan ditempuh dalam krisis saat ini³ Di Sumatera Selatan sebanyak 612 pekerja mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK), ada 7.020 dirumahkan dan tidak mendapat upah selama masa pandemi⁴.

Kepala Bidang Hubungan Industrial Dinaskes Palembang, Fahmi hatta juga mengatakan 165 pekerja yang tidak diberikan pesangon setelah diberhentikan dari perusahaannya akibat dampak Virus Corona, kasus psangon itu terjadi pada akhir priode Januari-Oktober 2020. dimana jumlahnya mengalami peningkatan saat masa awal dan pertengahan pandemi atau sekitar April dan Juli. Saat ini jumlah tersebut sudah diproses lebih lanjut dengan mediasi antara pekerja dan perusahaan. Rinciannya ada 50 kasus yang dilakukan perjanjian bersama, 92 diberikan anjuran, 6 masih dalam proses, dan 17 kasus diberhentikan⁵

Banyaknya Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) Serta dirumahkannya pekerja tanpa upah di tengah pandemi Covid-19 ini, membuat masyarakat tidak bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka seperti biasanya, sehingga menyebabkan meningkatnya kriminalitas. Pakar Hukum Pidana Universitas Al Azhar Supraji Ahmad mengatakan banyaknya pemutusan hubungan kerja (PHK) akibat Penerapan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) selama masa pandemi Virus Corona di Indonesia mengakibatkan masyarakat nekat melakukan kriminal. Hal ini dikuatkan dengan data kepolisian yang menyebut tindak kriminal meningkat sebanyak 10 persen sejak penerapan PSBB di Indonesia. Tindak kejahatan atau kriminal yang meningkat seperti, mencuri, narkoba, dan penipuan. Situasi yang darurat akan menyebabkan masyarakat yang tidak dapat memenuhi kebutuhan pokoknya menjadi lebih nekat melakukan kejahatan untuk bertahan hidup dimasa pandemi COVID-19 di Indonesia⁶

Selain di PHK serta dirumahkannya pekerja, merebaknya virus Corona, juga membuat sejumlah perusahaan memotong gaji karyawan, karena pandemi Covid-19

³<https://amp.kompas.com/nasional/read/2020/04/09/16560461/jokowi-minta-pengusaha-tak-pecat-karyawan-di-tengah-wabah-covid-19> Diakses pada tanggal 06 September 2020 pada pukul 20:44 wib

⁴<https://m.merdeka.com/peristiwa/imbis-corona-612-pekerja-di-sumsel-kena-phk-dan-7020-dirumahkan.html> diakses pada tanggal 06 September 2020 pada pukul 20.48 wib

⁵<https://m.merdeka.com/peristiwa/imbis-corona-612-pekerja-di-sumsel-kena-phk-dan-7020-dirumahkan.html> diakses pada tanggal 06 September 2020 pada pukul 20.48 wib

⁶ <https://uai.ac.id/pakar-hukum-penyebab-kejahatan-meningkat-akibat-banyaknya-phk-di-tengah-pandemi-covid-19/> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pada pukul 11.23 wib

membuat kegiatan usaha terkena dampak negatif. Diberitakan sebelumnya, Sekjen Asosiasi Travel Agent Indonesia (Astindo) Pauline Suharno menyebut seluruh agen travel saat ini sudah benar-benar terpuruk karena virus corona. Bisnis ini merugi hingga lebih dari Rp. 4 triliun hingga februari 2020. agen travel terpaksa melakukan pemotongan gaji pada seluruh karyawan tetap mereka. Pemotongan gaji itu sementara mengikuti imbauan kerja dari rumah atau work from home (WFH) dari pemerintah di daerah masing-masing. Karena kebijakan WFH (work from home/kerja dari rumah) sehingga kerja dari rumah dan memberlakukan unpaid leave (pemotongan gaji) untuk semua karyawan. Bulan lalu dipotong selama 1 minggu saja. Bulan ini 2 minggu. Sehingga mereka hanya dibayar 50% plus tidak mendapat uang makan dan transportasi. Seharusnya gaji karyawan tetap agen travel dibayar penuh bahkan mereka sebelumnya mendapat uang makan dan transportasi⁷

Adapun permasalahan-permasalahan disekeliling buruh yang menunjukkan ketidakberdayaan mereka. Tidak ada cara lain yang mereka lakukan karena adanya pandemi Covid-19 ini. Apalagi kondisi pekerja/buruh yang terdampak dari Covid-19 ini, yaitu pekerja/buruh yang terindikasi atau masuk kedalam Orang dalam pemantauan (ODP), buruh yang terkena suspek COVID-19, dan pekerja yang telah positif terinfeksi COVID-19. mereka tidak menerima upah sama sekali. Dengan permasalahan yang dialami oleh pekerja/buruh tersebut perlu mendapatkan perhatian dan perlindungan hukum terhadap upah pekerja akibat Covid-19.

Saat ini Pemerintah telah menerbitkan berbagai kebijakan dalam menangani pandemi *coronavirus disease (Covid-19)*. salah satunya di sektor ketenagakerjaan, Menteri Ketenagakerjaan telah menerbitkan surat edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tentang Perlindungan Buruh dan Keberlangsungan Usaha Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19, sebagai suatu pedoman bagi pengusaha dan karyawan dalam menghadapi kesulitan masa kini.

Surat edaran ini dikeluarkan sehubungan dengan meningkatnya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan bahwa COVID-19 merupakan pandemi

⁷<https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4962608/pengusaha-potong-gaji-karyawan-di-tengah-corona-ini-kata-kemnaker> diakses pada tanggal 08 Juni 2020 pada pukul 12.45 wib

Global. SE yang ditandatangani tanggal 17 Maret ini ditunjukkan untuk para Gubernur di seluruh Indonesia, Bupati/Walikota ataupun pemangku kepentingan wilayah masing-masing.

Berdasarkan surat edaran itu juga Kementerian Ketenagakerjaan (Kemnaker) Ida Fauziyah, meminta para pengusaha agar memberikan perlindungan dan mengantisipasi penyebaran penyakit yang disebabkan virus corona itu ditempat kerja Secara garis besar, dalam surat edaran No.M/3/HK.04/III/2020 tersebut dibagi atas dua bagian besar pertama, pencegahan penyebaran COVID-19 di lingkungan kerja. Kedua, perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait COVID-19⁸.

Permasalahan upah sangat erat kaitannya dengan kesejahteraan buruh, upah sangat berkaitan dengan kesejahteraan sosial. Peraturan mengenai kesejahteraan sosial harus sesuai dengan norma-norma yang digali dari kebudayaan hukum masyarakat Indonesia sendiri sebagai subjek hukum utama. Salah satu sumber hukum warga negara Indonesia adalah norma agama. Norma agama adalah agama Islam, diketahui dalam agama Islam bahwa salah satu norma hukum yang begitu penting adalah *Maqashid Syariah*. Di Indonesia *Maqashid Syariah* menjadi salah satu batu uji yang cukup banyak digunakan sebagai pisau analisis undang-undang.

Maqashid syari'ah adalah sumber hukum pertama dalam Islam. *Maqashid syari'ah* adalah tujuan-tujuan syariat dan rahasia yang dimaksudkan oleh Allah dalam setiap hukum dari keluruhan hukum-Nya. Tujuan penetapan hukum yang disebut sebagai *maqashid syari'ah* merupakan konsep penting dalam kajian hukum Islam. Inti dari teori *maqashid syari'ah* adalah untuk mewujudkan kebaikan, menjauhi yang buruk, dan mendatangkan manfaat. Istilah yang sependan dengan inti dari *maqashid syari'ah* adalah *maslahat*, karena penetapan hukum dalam Islam harus bermuara kepada *maslahat*⁹. Salah satu tujuan *maqashid syari'ah* adalah menjaga akal. Untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, dimana kebijakan harus semata-mata ditujukan demi kemaslahatan masyarakat.

Berdasarkan penjelasan di atas selain langkah yang tepat untuk melindungi upah

⁸<https://bplawyers.co.id/2020/03/23/catat-surat-edaran-kemenaker-tentang-perlindungan-dan-pengupahan-pekerja-terkait-covid-19> diakses pada tanggal 06 September 2020 pada pukul 21.51 wib

⁹ Ghofar Shidiq, *Teori Maqashid Al' Syariah dalam Hukum Islam* (Jurnal : Sultan Agung VolXLIV No. 118 Juni-Agustus 2009), 118.

pekerja akibat Covid-19, pada masalah ini juga perlu mengkaji maqoshid syariah lebih lanjut untuk mengetahui apakah dengan adanya perlindungan hukum bagi upah pekerja akibat pandemi Covid-19 ini ada pada konsep Maqoshid Syariah.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dan merupakan jenis penelitian kualitatif (*field research*). Populasi dalam penelitian ini adalah petani karet dan pemilik kebun karet. Sampel yang dipilih yaitu sebanyak 5 orang dan 2 orang. Sedangkan teknik pengumpulan data menggunakan wawancara, dokumentasi dan observasi. Jenis data dan sumber data yang digunakan yaitu data primer dan sekunder. Teknik analisa data yang digunakan yaitu deskriptif kualitatif. Kemudian pembahasan ini disimpulkan secara deduktif yaitu dari umum ke khusus.

Kebijakan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Terhadap Perlindungan Hukum Bagi Upah Pekerja Akibat Pandemi Covid-19

Mengenai Perlindungan hukum terhadap pekerja yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa Perlindungan hukum ini bermaksud untuk menjamin hak-hak dasar pekerja/buruh, menjamin kesamaan kesempatan serta perlakuan tanpa diskriminasi atas dasar apapun guna mewujudkan kesejahteraan pekerja/buruh dan keluarganya dengan memperhatikan dunia usaha dan kepentingan usaha¹⁰.

Sedangkan upah adalah imbalan atau pembalasan berupa uang yang dibayarkan kepada seseorang guna membalas jasa yang sudah dikeluarkan untuk mengerjakan sesuatu. Bentuk perlindungan terhadap upah pekerja di Indonesia wajib dilaksanakan oleh setiap pengusaha atau perusahaan yang mempekerjakan orang untuk bekerja, dalam perusahaan tersebut haruslah memperhatikan tentang pemeliharaan dan peningkatan kesejahteraan terhadap pekerja.

Perlindungan bagi pekerja dibagi menjadi tiga yaitu perlindungan ekonomis, perlindungan sosial, dan perlindungan teknis¹¹. Adapun perlindungan tersebut harus diimbangi dengan hak-hak dan kewajiban para pekerja. Dengan perlindungan serta hak-

¹⁰ Purgito, "Perlindungan Hukum Bagi Pekerja dalam Perjanjian Kerja Waktu Tertentu Telaah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan". Vol. 9 No. 1 Maret 2018.

¹¹ Jimmy Joses Sembiring, *Hak dan Kewajiban Pekerja*, (Jakarta: Visimedia, 2016), 37.

hak dan kewajiban dari pekerja diharapkan akan menciptakan suasana yang harmonis antara perusahaan dan pekerja.

Upah merupakan tujuan utama bagi pekerja atau buruh. Dalam pemberian upah, ada 2 hal yang patut dipertimbangkan oleh pengusaha atau pemberi kerja, yakni prinsip keadilan dan prinsip kelayakan¹². Namun di saat pandemi Covid-19 atau virus corona. Banyaknya perusahaan mulai merumahkan pekerjanya karena dampak dari Covid-19. sebagian dari mereka ada yang masih membayar gaji pekerjanya meski tak penuh, tapi banyak juga yang tak membayar upah sama sekali, bahkan termasuk pekerja yang terdampak dari Covid-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan), dan suspek. Selain itu dampak paling menyedihkan karena pandemi ini yakni terjadinya PHK besar-besaran yang terjadi hampir diseluruh negara terjangkit COVID-19. di Indonesia. Kemenaker dan BPJS Ketenagakerjaan mencatat ada sekitar 2,8 juta pekerja yang terkena dampak dari Covid-19¹³. Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah, menyatakan yang dibutuhkan adalah kerja sama untuk mencari solusi terbaik dan menghindari PHK.

Perlindungan hukum bagi pekerja akibat Pandemi Covid-19 ini telah diatur melalui SE Kementerian Ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) Tentang Perlindungan Pekerja atau Buruh dan Kelangsungan Usaha Dalam Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Dalam Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut diminta kepada para Gubernur untuk melaksanakan perlindungan pengupahan pada pekerja/buruh saat Pandemi COVID-19 serta melakukan pencegahan, dan penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja¹⁴.

Surat Edaran Menaker Nomor (M/3/HK.04/III/2020) ini dikeluarkan sehubungan dengan tingginya penyebaran COVID-19 di beberapa wilayah Indonesia dan memperhatikan pernyataan resmi World Health Organization (WHO) yang menyatakan COVID-19 sebagai pandemi global. Perlindungan Pengupahan bagi Pekerja/buruh terkait Pandemi COVID-19.

Bagi Buruh yang dikategorikan sebagai Orang Dalam Pemantauan (ODP) terkait

¹² Emmanuel Kurniawan, *Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*, (Jakarta: Dunia Cerdas, 2013), 23.

¹³<https://m.cnnindonesia.com/ekonomi-phk-dan-pekerja-yang-dirumahkan-tembus-28-juta-karena-corona> diakses pada tanggal 08 Maret 2021 pada pukul 20.11 wib

¹⁴<https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 28 Januari 2021 Pukul 19.08.

COVID-19 berdasarkan keterangan dokter sehingga tidak dapat masuk kerja paling lama 14 (empat belas) hari maka upahnya dibayarkan secara penuh Bagi pekerja/buruh yang dikategorikan kasus suspek COVID-19 dan dikarantina/menurut keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan penuh selamamenjalani masa karantina.

Bagi pekerja/buruh yang tidak masuk kerja karena sakit COVID-19 dibuktikan dengan keterangan dokter, maka upahnya dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan. Bagi perusahaan yang melakukan pembatasan kegiatan usaha akibat kebijakan pemerintah daerah masing-masing guna pencegahan dan penanggulangan COVID-19, sehingga menyebabkan sebagian atau seluruh pekerjanya tidak masuk kerja, dengan mempertimbangkan kelangsungan usaha maka perubahan besaran maupun cara pembayaran upah pekerja bisa dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja/buruh¹⁵.

Mengenai isi surat edaran tersebut, untuk menghindari PHK, pengusaha bisa melakukan perubahan besaran ataupun cara pembayaran upah terhadap upah pekerja/buruh yang dirumahkan sementara akibat wabah COVID-19, berdasarkan kesepakatan para pihak.

Sebenarnya “dirumahkan nya pekerja” atau “pekerja yang dirumahkan” tidak diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan No. 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan. Walau begitu, dalam beberapa kasus, ada pekerja yang “dirumahkan”(namun tidak di PHK) oleh perusahaan karena berbagai alasan, misal karena perusahaan tidak dapat menjalankan produksi, perusahaan yang terkena krisis tertentu. Untuk itu kemudian ada aturan khusus mengenai “pekerja yang dirumahkan”, yang mana diatur dalam Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja, antara lain:

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No: SE-05/M/BW/1998 Tentang Upah Pekerja yang dirumahkan bukan kearah Pemutusan hubungan Kerja;

Pengusaha tetap membayar upah secara penuh yaitu berupa upah pokok dan tunjangan tetap selama pekerja dirumahkan, Bila pengusaha membayar upah pekerja tidak secara penuh, agar dirundingkan dengan pihak serikat pekerja dan atau para pekerja mengenaibesarnya upah selama dirumahkan Berdasarkan ketentuan-ketentuan

¹⁵<https://m.liputan6.com/news/read/4204852/ini-isi-surat-edaran-perlindungan-buruh-dan-kelangsungan-usaha-terkait-covid-19> diakses pada Tanggal 09 Maret 2021 pukul 07.33 wib

dari Surat Edaran Kementerian ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) pekerja/buruh yang terdampak dari COVID-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan) atau positif terkena COVID-19 juga berhak atas upah. Dalam suratedaran tersebut.

Jika pengusaha tidak sanggup membayar upah pekerjanya dalam situasi darurat kesehatan masyarakat, karena akibat pembatasan aktivitas dilingkup dunia ketenagakerjaan dan bisnis telah berdampak pada menurunnya keuntungan perusahaan. *Bagi perusahaan yang tidak sanggup membayar upah pekerja, tidak diperbolehkan untuk langsung serta merta mem-PHK pekerjanya atau tidak membayar upah pekerjanya.*

Karena dalam mengatasi hal tersebut, Perusahaan bisa mengajukan penangguhan pembayaran upah sesuai UMP (Upah Minimum Provinsi) Ke Gubernur. Mengenai upaya penangguhan upah oleh perusahaan telah diatur dalam Pasal 90 Undang-undang No.13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No. KEP-231/MEN/2003 Tahun 2003 tentang tata cara penangguhan Pelaksanaan Upah minimum, dan Peraturan Gubernur Sumatera Selatan nomor 16 Tahun 2004 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum Provinsi¹⁶.

Ketentuan-ketentuan tersebut telah menyatakan secara jelas jika perusahaan tidak dapat membayar upah pekerjanya sesuai dengan standar upah minimum, maka ia wajib membuktikannya dengan membuka laporan keuangan Perusahaannya dan mengajukan upaya penangguhan upah ke Gubernur. Namun, perusahaan harus melakukan perundingan terlebih dahulu kepada pekerja/buruh terkait penangguhan tersebut. Penangguhan pembayaran upah minimum oleh pengusaha kepada buruh tidak bisa menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar selisih upah minimum selama masa penangguhan.

Apabila upaya penangguhan upah tersebut disetujui, maka gubernur dapat mewujudkannya melalui penetapan keputusan Gubernur. Bila telah ditetapkan pada Keputusan Gubernur, maka Perusahaan bisa membayar upah pekerjanya dibawah standar Upah minimum. Dengan begitu, perusahaan harus membayar selisih kekurangan pembayaran upah Pekerja sesuai UMP di tahun selanjutnya.

¹⁶<https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 30 Januari 2021 Pukul 09-44

Analisis Maqashid Syariah Bagi Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Akibat Covid-19 Agama Islam merupakan suatu ajaran yang mana didalamnya mengatur segala hal baik itu mengenai kehidupan manusia, dalam ibadah maupun dalam segi muamalah. Manusia sebagai makhluk sosial tidak dapat hidup sendiri tanpa bantuan orang lain dalam memenuhi kebutuhannya. Islam sangat menganjurkan perlindungan bagi umatnya terlebih perlindungan terhadap pekerja yang membutuhkan bantuan. Ajaran Islam adalah ajaran yang tidak mempersulit dan memperberat manusia.

Upah sebagai peranan yang sangat penting bagi pekerja dan juga bagi kelangsungan hidupnya. Dalam Islam pemberian upah harus menerapkan konsep keadilan dan kelayakan bagi kesejahteraan pekerja. Perlindungan upah adalah perlindungan yang paling penting bagi tenaga kerja. Perlindungan hukum sendiri merupakan suatu gambaran dari fungsi suatu hukum yaitu konsep dimana hukum dapat memberikan suatu keadilan keterlibatan kepastian, kemanfaatan serta kedamaian¹⁷

Perlindungan Hukum upah pekerja akibat Pandemi Covid-19 sudah ada dalam Surat Edaran Menteri Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tentang Perlindungan Pekerja dan Kelangsungan Usaha Dalam rangka Pencegahan dan Penanggulangan Covid-19. Surat Edaran Menaker ini, disebutkan para Gubernur diminta melaksanakan perlindungan pengupahan bagi pekerja/buruh terkait Pandemi COVID-19 serta mengupayakan pencegahan, penanganan kasus terkait Covid-19 di lingkungan kerja¹⁸.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) jelas terdapat kemaslahatan didalamnya. Sesuai dengan masalah pada tulisan ini maka permasalahan ini masuk dalam maqashid syariah yang *daruriyat*. Permasalahan upah menjadi kebutuhan pokok bagi para buruh dan pengusaha. Mengenai pembahasan Maqashid Syariah ini hal yang menjadi fokus utama yakni Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut memuat maksud yang sesuai dengan Maqashid Syariah sebagai salah satu batu uji yang digunakan dalam penelitian.

Kebijakan Kementerian Ketenagakerjaan Nomor (M/3/HK.04/III/2020) yang didalamnya memuat Perlindungan Pengupahan pekerja akibat Covid-19 di lingkungan

¹⁷Sudikno Merto kusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*, (Yogyakarta:Liberty, 2000), 42.

¹⁸<https://gajimu.com/tips-karis/kondisi-kerja-dan-kehidupan-di-tengah-pandemi-covid-19-indonesia/faq-ketengakerjaan-dan-covid-19/faq-bekerja-di-tengah-pandemi-covid-19> diakses pada Tanggal 01 Maret 2021 Pukul 23.30

kerja, maka isi dari kebijakan ini masuk dalam ranah *hifdzu-māl* (Perlindungan terhadap harta benda) mempengaruhi pekerjaannya. Dari penjelasan tersebut maka dapat dipahami bahwa Nomor (M/3/HK.04/III/2020) masuk dalam ranah *hifdzu-māl*.

Mengenai perlindungan upah memang menjadi sangat penting dalam pandangan maqashid syariah. Karena upah menjadi kebutuhan utama bagi pekerja/buruh guna bertahan hidup. Apalagi pekerja yang terdampak dari Covid-19 mereka sulit memenuhi kebutuhan karena pembayaran upah tidak penuh, tidak menerima upah sama sekali bahkan sampai ada pekerja yang di-PHK. Mengenai menjaga harta benda maka maqashid syariah menilai hal ini sangat penting dan masuk dalam ranah *daruriyat* (kebutuhan pokok yang harus terpenuhi).

Surah Al kahfi [18]:46) :

الْمَالُ وَالْبَنُونَ زِينَةُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْبَاطِلُ الْأَصْلِحُ خَيْرٌ عِنْدَ رَبِّكَ ثَوَابًا وَخَيْرٌ أَمَلًا

46. Harta dan anak-anak adalah perhiasan kehidupan dunia tetapi amalan-amalan yang kekal lagi saleh adalah lebih baik pahalanya di sisi Tuhanmu serta lebih baik untuk menjadi harapan¹⁹

Harta merupakan hal penting bagi kelangsungan hidup pekerja dan keluarganya. Kebutuhan yang berupa sandang, pangan serta papan menjadi kebutuhan *daruriyat*, kebutuhan *daruriyat* tentu begitu mempengaruhi dalam prosesnya untuk melakukan ibadah kepada Allah yang maha kuasa.

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) yang ditetapkan pada 17 Maret 2021 lalu, menghasilkan dampak positif bagi pekerja/buruh yang penulis rasa cukup sesuai dengan Maqashid Syariah. Mengenai Surat Edaran tersebut maka secara Yuridis Normatif Pengusaha memiliki kewajiban berbuat adil kepada karyawannya.

Surah An- Nahl [16] 90):

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ وَإِيتَايِ ذِي الْقُرْبَىٰ وَيَنْهَىٰ عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ وَالْبَغْيِ يَعِظُكُمْ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ﴾

Artinya : Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat

¹⁹ Al-Qur'an Karim, Terj. M. Hasbi Ashshiddiqi, Bustami A. Gani, dkk, Yayasan Penerjemah Al-Qur'an yang ditunjuk oleh menteri agama (SK. No. 26 th. 1967), Qs. (QS. Al-Kahfi (18):46)

kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran.

Berdasarkan ayat diatas menjelaskan betapa pentingnya bersikap adil, baik, dan dermawan kepada para karyawan. Dan Selain itu, dari ayat tersebut dapat disimpulkan bahwa pemberi kerja dilarang oleh Allah berbuat keji. Penyelesaian permasalahan yang ditetapkan oleh Menteri Ketenagakerjaan kemungkinan ada beberapa aspek yang dapat mengurangi kemungkinan buruknya:

Perselisihan Hak Berdasarkan Surat Edaran Kemenaker tersebut maka pengusaha berkewajiban dalam membayar tanggungan upah kepada pekerja. Namun, dalam hal terjadi pemotongan upah buruh dengan alasan perusahaan merugi akibat COVID-19, pemotongan upah tersebut tidak sesuai hukum dan akan menimbulkan perselisihan perselisihan hak. Perselisihan hak timbul karena tidak terpenuhinya hak, akibat timbulnya perbedaan pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan, perjanjian bersama juga peraturan perusahaan.

Terjadi Praktik Riba

Riba dalam Islam merupakan perbuatan yang diharamkan dalam Islam. Riba yakni pengambilan keuntungan tambahan dengan jalan yang tidak dibenarkan. Dalam terjadinya praktek riba ini adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. (QS. Al-Baqarah :279):

فَإِنْ لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتِغُوا فَلَئِمَّ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ
لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ

279. Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul-Nya akan memerangimu. Dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya.

Ayat diatas menjelaskan bahwa dalam hal upah tidak selayaknya mengambil hak-

hak orang lain. Kepada pengusaha diwajibkan untuk membayar pekerja/buruh dengan bagian yang seharusnya mereka dapatkan dan tidak melakukan perbuatan yang akan menjadi riba. Namun, jika dilihat dari kasus perlindungan upah buruh yang sedang dibahas dimasa pandemi Covid-19. Maka pengusaha bisa mengurangi pembayaran upah atau tidak membayarkan upah sesuai UMP karena alasan tertentu dengan melakukan penangguhan upah yang berlandaskan pasal 90 Undang-undang No 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan. Sementara kepada buruh/pekerja harus menerima kebijakan tersebut agar tidak terjadinya kehilangan pekerjaan.

Terjaganya Hak dan Kewajiban

Berdasarkan Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut untuk terjaganya hak dan kewajiban antara buruh dan pengusaha makin membaik. Pengusaha mempunyai kesempatan untuk melakukan penangguhan upah sedangkan buruh tetap memperoleh upah yang ditangguhkan tersebut. Dengan begitu terciptanyalah Ketenagakerjaan yang lebih baik.

Mengenai kajian *Maqashid Syariah* terdapat lima pokok kebutuhan dasar, yaitu : agama (*hifdzu-din*), jiwa (*hifdzu-nāfs*), akal (*hifdzu al-'aql*), keturunan (*hifdzu nāsl*), dan harta (*hifdzu-māl*). lima pokok kebutuhan dasar diatas dikenal dengan nama *Al-ḍaruriyat al-Khamsah* (lima kebutuhan dasar)²⁰ Dalam perihal Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) tersebut maka hal ini masuk dalam tingkatan *al-ḍaruriyat al-khamsah*, dimana kebutuhan terhadap harta benda (*hifdzu-māl*) Adalah kebutuhan primer bagi kehidupan manusia.

Perlindungan upah terhadap pekerja akibat pandemi Covid-19 ini sudah sesuai dengan *Maqashid Syariah*. Karena didalam Surat Edaran tersebut terdapat hak-hak pekerja yang terdampak Covid-19, dan bagi pengusaha tetap bisa melakukan penangguhan upah sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berlaku. Penangguhan upah tersebut bisa dirundingkan antara pengusaha dan pekerja agar salah satu pihak tersebut tidak merasa dirugikan. Kesimpulan *Maqashid* pada praktek muamalah ini adalah terimplementasikannya *hifdzu-māl*. Prinsip ini menyangkut

²⁰ Muhammad Syukri Albani Nasution dan Rahmat Hidayat Nasution, *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syariah*, (Jakarta: Kencana, 2020), 43.

kehidupan orang banyak salah satunya bagi pekerja/buruh yang terdampak dari pandemi Covid-19. Dimana dalam kasus di Indonesia kebanyakan pekerja bergantung pada upah untuk memenuhi kebutuhan mereka dan keluarganya.

Kesimpulan

Pengusaha yang melakukan pembatasan usaha akibat dari kebijakan Pemerintah sehingga sebagian pekerja dirumahkan atau tidak masuk kerja maka cara pembayaran upah bisa dilakukan berdasarkan kesepakatan antara Pekerja dan Pengusaha dan pada Surat Edaran Nomor (M/3/HK.04/III/2020) Tentang Perlindungan Pekerja Akibat Pandemi Covid-19, Pekerja yang terdampak pandemi Covid-19 seperti ODP (Orang Dalam Pengawasan), PDP (Pasien Dalam Perawatan), atau pasien yang positif corona berhak mendapatkan upah. Upah tersebut dibayarkan sesuai peraturan perundang-undangan serta kesepakatan.

Ditinjau dari segi Maqashid Syariah yang terdapat dalam kasus tersebut merupakan solusi terbaik dalam mencapai kemaslahatan bersama. Karena masuk dalam tingkatan *daruriyat* dimana peran negara diperlukan dalam kebijakan ini. Kemudian kebijakan tersebut juga masuk dalam ranah *hifdzu-māl*, dimana menjaga harta (*hifdzu-māl*) merupakan sebuah kewajiban yang harus dilaksanakan untuk menjaga ketenangan. Pengusaha dapat mengajukan penangguhan upah berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dan pekerja. Sehingga ini sesuai prinsip utama pada Muamalah Syariah. Dalam Surat Edaran tersebut secara *masalah* juga mengandung *hifdzu-nāfs* (perlindungan terhadap jiwa). *hifdzu-nāfs* ada karena terdapat pencegahan penyebaran dan penanganan kasus mengenai COVID-19 dilingkungan kerja dan faktor perlindungan upah buruh akibat Pandemi Covid-19 merupakan kebutuhan *daruriyat* bagi pekerja/buruh serta keluarganya.

Daftar Pustaka

Al-Qur'an dan Hadist:

Kementerian Agama RI. 2000. Al-Qur'an Dan Terjemahan. Bandung: Diponegoro.

Sulaiman Ibnu Al-Asy'ats Ibn Syadad Ibn Umar Al-Azdi Abu Daud, *Sunan AbuDaud*. Juz ke-10. Kairo: Mawqi' Wizaraah Al-Sauqof Al-Mishriyah, T.Th.

Undang-Undang No 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.

Buku :

Albi Anggoro dan Johan Setiawan, *Metode Penelitian Kualitatif*, Cet ke-1 Jawa Barat: CV Jejak, 2018

Ali, Zainudin. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, 2016.

Asyhadie, Zaeni dan Rahmawati Kusuma. *Hukum Ketenagakerjaan Dalam Teori & Praktik di Indonesia*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2019.

Bahri, Idik Saeful. *Perlindungan Upah Bagi Pekerja Badan Usaha Milik Desa*. Yogyakarta: Bahasa Rakyat, 2020

Bastri, Hasniar dkk. *Polemik Covid-19 dan Perubahan Sosial*. Sulawesi Selatan: IAIN Parepare Nusantara Press, 2020.

Bungin, Burhan. *Metode Riset Penelitian Sosial: Format 2 Kuantitatif dan Kualitatif*. Surabaya: Airlangga University Press, 2005.

Busyro. *Maqashid al-Syariah*. Jakarta Timur: Kencana, 2019.

Pengantar Filsafat Hukum Islam. Jakarta: Kencana Pranada Media, 2020. *Maqashid Syariah Pengetahuan Mendasar Memahami Masalah*. Jakarta Timur: Pranada Media, 2019.

Efendi, Jonaedi dan Jhonny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Depok: Pranada Media Group, 2017.

Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam*. Bandar Lampung: CV Arjasa Pratama, 2020

Hajati, Sri. dkk. "*Buku Ajar Politik Hukum Pertanahan*". Surabaya : Airlangga University Press, 2017.

Hasibuan, Melayu S.P. *Manajemen Sumber daya Manusia*, Ed Revisi, Jakarta: Bumi

- Aksara, 2009.
- Hayati Nur, Ali Imran Sinaga. "*Fiqh dan Ushul Fiqh*". Jakarta : Prenadamedia Group, Ed. 1, 2018
- Kadir Abdul dan Ika Yunia. *Prinsip Dasar Ekonomi Islam Perspektif Maqashid Al-Syariah* Jakarta PT Fajar Interpratama, 2014.
- Karimi, Ahmad Faizin dan David Efendi. *Membaca Corona: Esai-esai tentang Manusia, Wabah, dan Dunia*. Jawa Timur: Caremedia Communication, 2020.
- Kurniawan, Emmanuel. *Tahukah Anda Hak-Hak Karyawan Tetap dan Kontrak*. Jakarta: Dunia Cerdas, 2013.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*, Cet. 9. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2016.
- Mufid, Mohammad. *Ushul Fiqh Ekonomi dan Keuangan Kontemporer*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2016.
- Nasution, Muhammad Syukri Albani dan Rahmat Hidayat Nasution. *Filsafat Hukum Islam dan Maqashid Syari'ah*. Jakarta, Kencana, 2020.
- Praja, Juhaya S. Praja. *Filsafat Hukum Islam*. Bandung: LPPM Universitas Islam Bandung, 2017.
- Rahayu, Devi. *Buku Ajar Hukum Ketenagakerjaan*. Surabaya : Scorpindo Media Pustaka, 2019.
- Rozin, Musnad. *Ushul Fiqh I*. Yogyakarta: IDEA Press, 2015
- Ruysd, Ibnu. *Bidayatul Mujtahid* Terj. Cet II, Jakarta: Pustaka Amani, 2002.
- Sadi Is, Muhammad dan Sobandi. *Hukum Ketenagakerjaan Di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2020.
- Hukum Perusahaan di Indonesia*. Jakarta : Kencana, 2016.
- Sa'diyah, Mahmudatus. *Fiqh Muamalah II*, Jawa Tengah: Unisnu Press, 2019
- Sembiring, Jimmy Joses. *Hak dan Kewajiban Pekerja*. Jakarta: Visimedia, 2016.
- Soekanto, Soerjono dan Sri Mamuji. *Penelitian Hukum Normative*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada. 2004.
- Soekanto, Soerjono. "*Pengantar Penelitian Hukum*". Jakarta, Ui Press, 2014.
- Soepomo, Imam. *Pengantar Hukum Perburuan*, Jakarta : Djambatan, 2003.
- Sofiani, Trianah. *Perlindungan Hukum Pekerja Rumah Tangga Berbasis Hak Konstitusional*,

Yogyakarta: CV Budi Utama , 2020.

Tamrin, Dahlan. *Filsafat Hukum Islam*, : UIN Malang Press, Malang, 2007,hlm.6.